

EFEKTIVITAS APARATUR BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM) DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG YAUGAPSA DISTRIK DEMTA KABUPATEN JAYAPURA

Isak Wondiwoi*, Nundius Wenda*, Frediel Gobai* dan Marianus Lamere*

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Silas Papare Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 29 November 2022

Disetujui 31 Desember 2022

Keywords:

Efektivitas
Bamuskam
Pembangunan

ABSTRAK

Abstract : *The success of the development of a village cannot be separated from the role of Bamuskam as a leader in the village, this is also a function of the village government itself, namely the function of development. This study aims to determine the effectiveness of the Bamuskam apparatus in development, through its role as village leader in making policies, decisions, and the budget used. The research informants taken in this study were the village head himself as a key informant, and the village apparatus as the main informant, as well as the village community as complementary informants, with qualitative descriptive research methods. The results of the study indicate that the effectiveness of the National Security Council in making development decisions and policies is still based on the program that has been formulated at the village development planning deliberation which is carried out annually with a budget that has been received by the village through village funds, both the implementation of physical development and non-physical development such as community development which includes fostering farmer groups, youth and housewives.*

Abstrak : Keberhasilan pembangunan suatu kampung tidak terlepas dari peran Bamuskam sebagai pemimpin yang ada di kampung, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah kampung itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas apartur Bamuskam dalam pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin kampung dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala kampung itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat kampung sebagai informan utama, serta masyarakat kampung sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Bamuskam dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh kampung melalui dana kampung, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Isak Wondiwoi
Program Studi Ilmu Pemerintahan,
STISIP Silas Papare Jayapura,
Jalan Diponegoro No 14 Jayapura
E-Mail : wondiwoiisak@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara umum kemiskinan disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas sumber daya alam, sehingga peluang produksi kecil ataupun jika kegiatan produksi dapat dilakukan pada umumnya tingkat efisiensi yang relatif rendah. Di Kampung Yaugapsa Distrik Demta pada umumnya faktor yang paling utama mempengaruhi fenomena kemiskinan di samping sumber daya manusia yang rendah, juga teknologi. Bagian lain kemiskinan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di Kampung Yaugapsa Distrik Demta itu sendiri dan juga kurang berperannya lembaga itu dalam menampung aspirasi masyarakat. Ini adalah yang dinamakan kemiskinan secara struktural.

Dalam mengantisipasi hal tersebut di atas, berbagai pihak lembaga pemerintah, swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melakukan serangkaian inisiatif dan program. Mulai dari Jaring Pengaman Sosial (JPS), program padat karya sampai pada yang dikenal dengan program pemulihan masyarakat atau *Community Recovery Program* (CRP). Semua itu diharapkan mencapai sasaran utama program yaitu penanggulangan dan pengentasan masyarakat miskin di Indonesia. Yang menjadi persoalan banyak program dan pelaku yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang kemiskinan itu sendiri. Ketidaktahuan tentang konsep dan bentuk kemiskinan itu tentunya sangat fatal karena memungkinkan tidak tepatnya rumusan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang dijalankan yakni Jaring Pengaman Sosial (JPS) misalnya tidak tepatnya sasaran karena lebih mengarah pada kelompok miskin baru, tidak adanya misi pemberdayaan masyarakat, mematikan keswadayaan masyarakat, partisipasi semu, bermuatan politik, kurang koordinasi dan menambah hutang rakyat. (Gunawan Sumadiningrat dalam Mubyarto, 2000:28).

Demikian pula dalam upaya dan keinginan pemerintah pusat yang lebih mengedepankan pembangunan wilayah dalam konsep paradigma pembangunan otonomi daerah selama ini hanya menyentuh masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat asli Papua yang berada di pedesaan/kampung masih memerlukan perhatian serius dalam upaya pembangunan. Berbagai upaya pemberdayaan dalam pembangunan telah dilakukan sejak adanya era otonomi khusus di Papua, mulai Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang selanjutnya Program Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Nasional (PMPN) dan PNP Mandiri yang bertujuan untuk lebih mendekatkan program kepada masyarakat asli Papua yang berada di pedesaan sehingga dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, disamping tumbuhnya kemandirian lokal pada masyarakat asli Papua untuk mengelola kesejahteraannya dengan lebih baik. Namun demikian, ketimpangan kesejahteraan masih tetap dirasakan oleh masyarakat asli Papua akibat sasaran program yang hanya dapat disentuh oleh sebagian masyarakat asli Papua.

Berdasarkan uraian singkat di atas dengan melihat fenomena kampung dan kondisi kehidupan masyarakat di Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura, maka perencanaan pembangunan kampung tidak hanya lebih diarahkan dan berorientasi pada pendekatan dari bawah ke atas yaitu dengan adanya sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Dengan melalui sistem perencanaan yang demikian maka partisipasi masyarakat kampung akan semakin meningkat karena semua rencana pembangunan dibuat oleh masyarakat sendiri melalui Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) sehingga dalam rangka melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dengan perencanaan. Pemerintah telah menempuh kebijaksanaan dengan apa yang disebut *top down planning* dan *bottom up planning*. Dengan demikian untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan, harus didasari atau dimulai dengan suatu mengisi pembangunan dalam hal pembangunan kampung selalu dimulai dengan perencanaan.

Dengan adanya sistem itu masyarakat kampung diharapkan dapat berprakarsa, berswadaya, berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan dalam arti masyarakat kampung itu sendiri yang merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan menilai hasil-hasilnya. Sebagai realisasi pelaksanaan sistem perencanaan dari bawah, masalah dan kendala yang dihadapi di Provinsi Papua khususnya di Kampung Yaugapsa Distrik Demta dalam pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) pada tingkat kampung sering tidak sinkron dengan perencanaan dari atas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan, keterampilan dan keahlian dari aparat Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam membuat suatu perencanaan pembangunan yang baik sehingga rencana yang disusun tersebut dalam realisasinya tidak mencapai sasaran yang ditargetkan;
2. Aparat kampung kurang memahami perencanaan yang dibuat dari atas disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki masih relatif rendah; dan
3. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan yang tepat terhadap aparat kampung dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan oleh instansi terkait.

Menyadari hal-hal tersebut di atas, maka penulis memandang hal ini sangat penting untuk diteliti karena efektifitas pembangunan yang berawal dari bawah dan menurut aspirasi masyarakat kampung secara utuh

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di kampungnya.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas aparatur Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam pembangunan Di Kampung Yaugapsa Distrik Demta?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi efektivitas aparatur Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam pembangunan Di Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura?

TUJUAN PENELITIAN

1. Sebagai sumbangan pikiran dan kiranya memberikan manfaat bagi efektivitas aparatur Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam pembangunan Di Kampung Yaugapsa Distrik Demta; dan
2. Memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat ilmiah sebagai bahan referensi pemikiran yang berhubungan dengan masalah efektivitas aparatur Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam pembangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang arti dari perencanaan maka terlebih dahulu akan diuraikan arti dari manajemen, karena perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang sangat penting serta menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Siagian, (1998:5) bahwa: "Manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain". Sedangkan Thoha, (1999:225) bahwa: "Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain".

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan untuk mencapai tujuan, dimana seseorang karena jabatan dan tanggung jawabnya mempengaruhi orang lain dan peralatan yang tersedia untuk bekerjasama bagi usaha pencapaian tujuan.

Agar proses manajemen dapat berlangsung diperlukan sarana-sarana tertentu. Dalam manajemen sarana itu antara lain yang dikenal dengan istilah 5 M yakni : Man, Money, Machine, Material, Methode. Kemudian agar manajemen dapat berjalan dengan efektif diperlukan rangkaian kegiatan tertentu yang dalam lingkungan administrasi dan manajemen dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi manajemen seperti dikemukakan oleh Terry, (1998:15) meliputi: "Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas yang meliputi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)". Fungsi-fungsi manajemen ini mempunyai hubungan yang erat, dimana masing-masing fungsi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dari penjelasan tentang fungsi-fungsi manajemen di atas maka perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen.

Dalam memberikan batasan tentang perencanaan menurut Warsito, (1999:13) bahwa: "Perencanaan adalah suatu proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat mengenai beberapa hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan". Sedangkan menurut Kontntz, (1989:114) bahwa: "Perencanaan adalah perumusan tujuan, prosedur dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa mendatang dan periraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut". Menurut Siagian, (1998:108) bahwa: "Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dalam rangkaian tujuan yang ditentukan".

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa perencanaan adalah tindakan awal perkiraan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selanjutnya Warsito, (1999:24) mengatakan bahwa: "Rencana dikatakan baik, apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Rencana mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, (2) Rencana bersifat luwes, sesuai dengan perkembangan yang terjadi, (3) Rencana bersifat rasional, dalam arti disusun berdasarkan pada fakta dan data, bukan merupakan khayalan atau diduga-duga, (4) Rencana bersifat sederhana dalam arti sudah dilaksanakan, tidak terlalu idealistis, (5) Rencana mempunyai daya guna, dalam arti hasil pelaksanaan sesuai rencana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya".

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo, (2001:12) meliputi: "(1) Perencanaan tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia, (2) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan

sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif, (3) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijaksanaan (policy formulation). Selanjutnya menurut (Weterson seperti dikutip oleh Diana Conyysers, 2000 : 4) bahwa : “Pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi apapun yang terlintas dalam pikiran kita apabila kita membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persolan pengambilan keputusan, implikasinya adalah bahwa ada cara yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan tersebut, mungkin dengan cara lebih emperhatikan lebih banyak data yang ada, atau hasil-hasil yang mungkin dicapai dimasa yang akan datang”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Winarno Surakhmad, (1998:39) bahwa: “Metode deskriptif adalah membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikannya”.

Dengan demikian berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang sedang terjadi atau berlangsung dan aktual.

Teknik atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang diteliti, (Sutrisno Hadi, 1998:115).

Dalam penelitian ini peneliti langsung mendatangi tempat penelitian serta mengamati berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para responden.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan secara tatap muka, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban secara lisan, (Muhammad Hasyim, 1998:30).

Dalam penelitian ini peneliti langsung menanyakan kepada berbagai pihak yang mengetahui dengan persis terhadap berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Kuisisioner (Angket)

Yang dimaksud dengan kuisisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan, (Mardalis, 2000:67).

Dalam penelitian ini peneliti edarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

4. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah cara yang digunakan untuk mempelajari pendapat-pendapat para ahli yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan suatu karangan ilmiah, (Koentjaraningrat, 1998:40).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan berbagai buku-buku yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan geografis menurut sumber data Kampung Yaugapsa bahwa secara administratif merupakan salah satu kampung yang berada pada Wilayah Distrik Demta, dan sekaligus merupakan bagian daripada Wilayah Kabupaten Jayapura. Selain itu letak Kampung Yaugapsa.

Demikian pula, keadaan iklim daripada Kampung Yaugapsa merupakan daerah beriklim tropis diketahui dari Badan Metereologi dan Geofisika Kabupaten Jayapura.

Keadaan penduduk daripada Kampung Yaugapsa, menurut data monografi kampung pada Kantor Pemerintahan Kampung Yaugapsa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 406 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki, sebesar 201 orang, dan jumlah penduduk perempuan sebesar 205 orang.

1. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM)

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan adalah merupakan suatu proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat mengenai beberapa hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian perencanaan dari bawah merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna merumuskan secara teliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri melalui mekanisme, prosedur, koordinasi yang telah ditetapkan dalam bentuk program dalam mewujudkan tujuan nasional.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dari data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai hasil penelitian masyarakat mekanisme perencanaan. Kita ketahui secara bersama bahwa mekanisme perencanaan merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Karena tanpa mekanisme perencanaan yang mantap, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi terhadap berbagai komponen yang akan dikerjakan. Mekanisme perencanaan merupakan suatu sistem yang berlaku dalam memperlancar suatu pekerjaan, oleh sebab itu mekanisme perencanaan itu harus diikuti dengan baik sehingga apa yang diharapkan dari mekanisme perencanaan itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dari suatu pekerjaan, maka tentunya di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan, sehingga apa yang dikerjakan dapat tercapai dengan baik.

Kemudian dari data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian akan memberikan gambaran kepada kita tentang prosedur perencanaan. Kita ketahui secara bersama bahwa prosedur perencanaan adalah merupakan suatu rangkaian tindakan yang ditempuh secara kronologis. Untuk menjamin terselenggaranya perpaduan yang harmonis dari semua program dalam rangka meningkatkan proses pembangunan, maka diperlukan adanya suatu situasi dan kondisi yang paling mendukung baik dengan masyarakat maupun dengan aparat pemerintah kampung sehingga segala aktivitas yang dilaksanakan dapat menjadi jelas terarah menuju sasaran yang akan dicapai. Agar supaya pembangunan dapat terlaksana dengan baik, maka tentunya pembangunan tersebut harus didukung dengan berbagai aspek atau komponen yang dapat menunjang terlaksananya pembangunan tersebut dengan baik. prosedur perencanaan merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas pembangunan. Karena tanpa prosedur perencanaan, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Kita ketahui secara bersama bahwa sekarang ini pelaksanaan pembangunan baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah kampung-kampung sekarang ini lebih cenderung pelaksanaan pembangunan itu dirancang dari bawah dalam arti bahwa masyarakatlah yang merancang pelaksanaan pembangunan itu atau pembangunan itu bermula dari masyarakat. dengan adanya perencanaan pembangunan dari bawah dalam hal ini masyarakat, maka dengan sendirinya berbagai kebutuhan dari masyarakat akan terpengaruhi dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan yang datang dari atas, seringkali mengalami suatu kegagalan karena apa yang dibangun tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Dari berbagai permasalahan yang sering kali dijumpai, maka pada saat sekarang ini pemerintah telah berusaha untuk merangkul masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan baik dalam mekanisme, prosedur bahkan sampai pada koordinasi. Dengan berbagai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, maka tentunya akan mempengaruhi terhadap berbagai hasil yang akan dicapai.

Dari berbagai gambaran-gambaran yang telah dikemukakan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa prosedur perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dalam melaksanakan berbagai aspek. berdasarkan data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada kita tentang koordinasi perencanaan. Kita ketahui secara bersama bahwa koordinasi perencanaan adalah merupakan suatu usaha untuk menyatukan dan menyelelarkan semua kegiatan dalam satuan unit kerja dalam suatu organisasi yang bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Dengan adanya koordinasi yang baik dan efektif akan tercipta suatu keharmonisan dalam gerak dan tindakan. Lembaga organisasi di kampung serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam peningkatan kelancaran proses pembangunan di kampung.

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena tanpa adanya koordinasi yang baik antara para pelaksana pekerjaan tersebut, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi berbagai pekerjaan yang akan dikerjakan. Untuk dapat memperoleh hasil pekerjaan yang baik, maka masalah koordinasi harus ditumbuhkan dalam berbagai aspek pada akhirnya akan tercipta suatu kondisi kerja yang baik diantara sesama para pekerja.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam berbagai perencanaan sangatlah penting sekali untuk dilaksanakan dalam berbagai aktivitas, karena tanpa didukung dengan koordinasi yang baik maka sia-sialah apa yang dikerjakan kita sendiri.

2. Peningkatan Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Yaugapsa merupakan suatu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara menyeluruh terpadu, terarah dan dinamis serta berkelanjutan mempunyai makna yang hakiki karena di dalam pelaksanaannya selalu berusaha untuk menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan yang dilaksanakan di kampung harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi

serta kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah kampung terutama menyangkut potensi manusia serta dukungan dana pembangunan yang ada, sehingga dapat memperlancar pembangunan.

Keterpaduan program pembangunan suatu proses dimana pembangunan itu dilaksanakan atau dilakukan selalu ada program yang datanya dari masyarakat yang dipadukan dengan program dari pemerintah. Sehingga pembangunan tersebut akan menjadi prioritas utama yang dapat menyangkut harkat dan martabat masyarakat yang berada di kampung tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus dan sudah barang tentu harus melalui suatu proses yaitu harus melalui berbagai tahapan-tahapan yang dilihat baik dari segi hasil, waktu maupun dana yang tersedia tentunya akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan pembangunan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat serta kemajuan jaman, maka tidaklah menutup kemungkinan untuk melaksanakan keterpaduan program pembangunan baik yang datangnya dari pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut benar-benar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas, maka data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada kita dengan jelas tentang betapa pentingnya keterpaduan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Yaugapsa. Kita ketahui secara bersama bahwa dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah kampung bersama masyarakat tentu akan berhasil dengan baik, maka tentunya harus didukung dengan berbagai aspek diantaranya harus ada suatu pola, sistem dan mekanisme kerja yang tepat sehingga dapat memperlancar proses pembangunan tersebut.

Mekanisme pembangunan merupakan suatu proses keterpaduan antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah serta didukung oleh masyarakat itu sendiri. Untuk lebih menjamin terselenggaranya keterpaduan pembangunan yang harmonis dari semua program dalam rangka meningkatkan kelancaran proses pembangunan kampung diperlukan adanya suatu situasi dan kondisi yang saling mendukung baik dengan aparat pemerintah terutama dalam perencanaan selalu melibatkan masyarakat sehingga aktivitas yang telah direncanakan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam upaya menerapkan keterpaduan program pembangunan, maka tentunya harus benar-benar memperhatikan berbagai komponen yang mendukung terhadap kelancaran pembangunan itu sendiri. Pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan harus ditempuh dengan apa yang akan dibangun benar-benar dapat menyentuh seluruh kehidupan masyarakat.

Perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik tentunya merupakan program-program yang sangat penting sekali untuk dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perkampungan. Dengan adanya kedua jenis pembangunan tersebut aspek-aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Dilihat dari pembangunan fisik dan non fisik yang ada di Kampung Yaugapsa secara menyeluruh dapat dikatakan sangat mendukung dalam kehidupan masyarakat serta dapat dikatakan bahwa jenis pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat yang berdomisili di kampung tersebut. Dalam upaya melaksanakan program pembangunan dari bawah sangat diperlukan adanya suatu koordinasi yang baik dan efektif sehingga apa yang diharapkan akan tercapai sinkronisasi dalam program pembangunan yang datanya dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya suatu koordinasi yang baik, maka tentunya akan tercipta suatu keharmonisan dalam gerak dan tindakan antara para pelaksana pembangunan itu sendiri.

Dari data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Yaugapsa. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu program pembangunan maka tentunya harus didukung oleh berbagai aspek yang sangat mendukung terhadap keberhasilan berbagai diantara adalah keterpaduan program, koordinasi serta mekanisme kerja.

Berdasarkan kenyataan yang ada tentunya akan memberikan gambaran kepada kita bahwa keberhasilan pembangunan yang ada di Kampung Yaugapsa karena didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. dan kita ketahui secara bersama bahwa keberhasilan dari suatu pembangunan pada prinsipnya demi kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Yaugapsa dapat berjalan dengan baik karena adanya suatu keterpaduan program yang baik antara pemerintah kampung dan masyarakat sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentunya pasti menghadapi berbagai kendala-kendala yang menghambat terhadap proses pekerjaan tersebut. Dilihat dari data penelitian yang diperoleh

pada hasil penelitian tentunya akan memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai faktor penghambat yang dirasakan dalam melaksanakan berbagai pembangunan di Kampung Yaugapsa.

Pelaksanaan pembangunan tentunya merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perkampungan. Sebab kita ketahui secara bersama bahwa dengan adanya pembangunan maka dengan sendirinya akan mempengaruhi terhadap berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

Namun seringkali dalam pelaksanaan pembangunan tersebut mengalami berbagai kendala sehingga pembangunan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kendala yang dirasakan tentunya akan memberikan dorongan dan motivasi kepada para pelaksana pembangunan tersebut untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik sehingga pada akhirnya pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh pada hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai faktor pendukung terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Yaugapsa.

Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dalam suatu proses pembangunan maka tentunya harus didukung oleh berbagai komponen yang sangat mengikat terhadap pembangunan itu sendiri. Dilihat kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Yaugapsa, secara menyeluruh dapat dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterpaduan program yang lahir dari masyarakat dan didukung oleh pihak pemerintah sangat baik sekali untuk dikembangkan dalam berbagai program-program pembangunan di masa-masa yang akan datang.

4. Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Perlu adanya ketersediaan dana pembangunan dari pihak pemerintah yang memadai, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan.
- b. Keterpaduan program pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan harus di jaga dan di bina sehingga selalu tumbuh keharmonisan kerja diantara kedua belah pihak.
- c. Pemerintah kampung merupakan kepanjangan dari pihak pemerintah kita sehingga selalu menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan kampung dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan di kampung.
- d. Partisipasi masyarakat sangat penting sekali di dalam keikutsertaan pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan, maka sebagai penutup dari penulisan skripsi ini akan diketengahkan tentang: A) Kesimpulan; dan B) Saran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Dari berbagai hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa Badan Musyawarah Kampung (BUMUSKAM) sangat menentukan terhadap kelancaran pembangunan di kampung yaitu melalui mekanisme, proses serta koordinasi pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan;
- b. Dari data penelitian menunjukkan bahwa keterpaduan program pembangunan yang datanya dari masyarakat dan pemerintah kampung dapat terlaksana dengan baik; dan
- c. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di Kampung Yaugapsa baik fisik dan non fisik dapat berjalan sesuai dengan keterpaduan program yang ada.

2. Saran

- a. Kepada pemerintah kampung agar supaya dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat;
- b. Kepada masyarakat diharapkan dalam menjalankan berbagai program pembangunan agar supaya memperhatikan kondisi keuangan yang ada di pemerintahan kampung;
- c. Keterpaduan program pembangunan selalu menjadi prioritas utama dalam melaksanakan program pembangunan di kampung; dan
- d. Koordinasi sangat penting sekali yang harus di bangun dan di jaga sehingga selalu terjalin suatu keharmonisan kerja dalam segala macam aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Thoha Kuswara, 1999, *Manajemen Pembangunan Desa*, Grafindo Utama. Jakarta.
- Anonim, 2012, *Petunjuk Teknis Program Bantuan Keuangan kepada Kampung (BK3), Perubahan Buku 1 Tahun 2011*. Lani Jaya : Unit Kerja Program Bantuan Keuangan kepada Kampung (UPK-BK3) Kabupaten Jayapura.
- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjoyo, 2001, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Gunung Agung, Jakarta.
- Buku Pedoman Kerja Aparat Pemerintahan Kampung, 2003, *Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua*, Jayapura.
- Buku I Administrasi Umum (Model A), 2003, *Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua*, Jayapura.
- Buku II Administrasi Penduduk (Model B), 2003, *Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua*, Jayapura.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta.
- Hasibuan, SP. H. Malayu, 1998, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasyim, Muhamad, 1998, *Petunjuk Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- I Nyoman Brata, 1999, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Koentjaraningat, 1997, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1998, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Mardalis, 2000, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mubyarto, 2000, *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Nawawi Hadari, 1997, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang *Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*.
- Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012, *Petunjuk Teknis (Perubahan Buku 1 tahun 2011) Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3), UKP-BK3 Kabupaten Jayapura*.
- Prawiro, 2000, *Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*, Yogya Liberty, Yogyakarta.
- Repetada, 2001, Provinsi Papua, Jayapura.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1993, *Metode Analisis Data Pada Dimensi Metodologis Dalam Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soedarto, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Stisipol Silas Papare, Jayapura.
- S. P Siagian, 1998, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Terry, George, 1998, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang *Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang*.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Warsito, 1999, *Menejer dan Manajemen*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Winarno Surakhmad, 1999, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito. Bandung.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Yunus, 2004, *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta, STIM YKPN.